BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dan memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara dari sektor nonmigas. Penerimaan negara terbesar ini harus ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan di Indonesia agar dapat berjalan dengan baik. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar, berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Dalam Negri	Persentase (%)
2007	706.108	490.988	69,53
2008	979.305	658.701	67,26
2009	847.096	619.922	73,18
2010	992.249	723.307	72,90
2011	1.205.346	873.874	72,50
2012	1.332.323	980.518	73,59
2013	1.497.521	1.148.365	76,68

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2007 mencapai Rp.490.988 miliar (69.53%), sedangkan pada tahun 2013 jumlah tersebut telah mencapai Rp.1.148.365 miliar (76.68%) dari seluruh realisasi APBN. Karena peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan setiap tahunnya, maka pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar dalam APBN.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, *self assessment system* sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran merupakan bentuk dari penghindaran pajak. *Self assessment system* memiliki tujuan penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu *tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak, serta *tax discipline* wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan (Rahayu, 2010).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk tetap dibayarkan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk meminimalisasi pajak dengan membuat agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, *et al.*, 2010). Bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan

bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik (Sari dan Martani, 2010).

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia banyak terjadi kasus agresivitas pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Oleh karena itu, pendapatan negara dari pajak yang seharusnya diterima besar menjadi kecil, hal ini mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara (Uppal, 2005). Menurut Frank, *et al.* (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (Surbakti, 2012). Ciri khas dari suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya (*size*). Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Jadi, semakin besar perusahaan maka semakin besar juga total aset yang dimiliki sehingga perusahaan perlu memberikan informasi yang jelas kepada

pemegang saham dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya. Karena tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) yaitu dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Sehingga dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Jika pemberian informasi kepada pemegang saham tidak sesuai dengan kenyataannya di perusahaan maka ada kemungkinan perusahaan melakukan pelanggaran yang terdeteksi, sehingga semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan pelanggaran. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, yang pada akhirnya menyebabkan nilai perusahaan menjadi menurun di mata pemegang saham (pemilik perusahaan).

Selain besar kecilnya ukuran perusahaan yang mempengaruhi agresivitas pajak, profitabilitas yang diukur dengan ROA juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya agresivitas pajak. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Menurut Dendawijaya (2003) ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Aktiva yang baik dapat dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan karena dapat merekayasa performa keuangan yang berkaitan laba perusahaan dengan menggunakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap

pendapatan kena pajak sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Hal ini merupakan tindakan perencanaan pajak, dengan cara yang tergolong secara legal (agresivitas pajak).

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang, selain itu *leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002). Menurut Noor *et al.*, (2010) mendefinisikan *leverage* sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak.

Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi hutang perusahaan sehingga menunjukkan ketergantungan perusahaan kepada kreditur yang dikarenakan membutuhkan dana peminjaman. Maka semakin tinggi *leverage* akan semakin tinggi peluang perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu dengan cara menggunakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), dalam hal ini adalah bunga pinjaman atas hutang. Sehingga dapat mengurangi laba kena pajak yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajakyang harus dibayar perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak selain tiga faktor di atas adalah intensitas modal. Menurut Noor *et al.*, (2010) intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar

asset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Pemilihan investasi dalam bentuk aset terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi.

Dengan semakin tinggi intensitas modal maka menunjukkan penjualan yang meningkat atas penggunaan aset. Jika aset tetap meningkat maka depresiasi juga semakin besar. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan atau depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Selain karakteristik perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak, karakteristik eksekutif juga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Pimpinan merupakan pengambil kebijakan dalam perusahaan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Pimpinan perusahaan terdiri dari *Chief Executive Officer (CEO)*, *Chief Financial Officer (CFO)*, dan *Top Executive*. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Dyreng *et al.* (2010) menguji pengaruh individu *top executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan serta diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa, eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani mengambil keputusan bisnis yang lebih berisiko dibandingkan *risk averse* sehingga besar kemungkinan terjadi agresivitas pajak.

Bedasarkan penjabaran di atas dan penelitian terdahulu saya tertarik untuk meneliti pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik eksekutif terhadap

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pajak yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dibahas untuk membatasi ruang lingkup penelitian yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah terurai di atas dapat diketahui bahwa maksud penelitian untuk mendapatkan data maupun informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak dibawah ini:

1. Bagi Investor

Manfaat yang ingin diberikan bagi investor yaitu agar dapat memperoleh informasi lebih jelas dan rinci dalam hal memilih perusahaan yang akan diinvestasi dan mengantisipasi risiko perpajakan yang muncul dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi akibat perusahaan melakukan agresivitas pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak DJP dapat melihat adanya kecenderungan perusahaan yang sedang melakukan agresivitas pajak dengan demikian DJP bisa melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan yang bersangkutan.